



## **EFEKTIVITAS PROGRAM DESTANA OLEH BPBD PROVINSI DKI JAKARTA DI KELURAHAN CILILITAN**

**Ghalda Efflina Balqis<sup>1</sup>, Maulana Rifai<sup>2</sup>, Made Panji Teguh Santoso<sup>3</sup>**

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa  
Karawang

### **Abstrak**

Pelaksanaan program desa tangguh bencana (Destana) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksana program di daerah berdasarkan peraturan kepala BNPB No 1 Tahun 2012 memutuskan bahwa destana dipilih menjadi salah satu program unggulan dalam upaya mitigasi serta penanggulangan bencana khususnya pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah percontohan pelaksanaan program ini adalah Kelurahan Cililitan. Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program destana pada wilayah Kelurahan Cililitan secara mendalam sebagai upaya dalam mitigasi bencana dengan menggunakan teori efektivitas yang menekankan pada empat indikator aspek penilaian berupa Pertama, Ketepatan program, Kedua, tujuan program, Ketiga, sosialisasi program dan Keempat, pemantauan program. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program desa tangguh bencana di wilayah kelurahan Cililitan telah berjalan cukup baik dan efektif meski dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kekurangan seperti kendala dalam pemenuhan sumber daya manusia pada pelaksanaan program destana, lalu sarana dan prasarana yang masih belum mencukupi seutuhnya serta sosialisasi dan pemantauan program yang dirasa belum berjalan secara maksimal menyebabkan masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana ini sendiri.

**Kata Kunci:** Program Desa Tangguh Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Efektivitas Program Destana.

---

\*Correspondence Address : [ghaldabalqies@gmail.com](mailto:ghaldabalqies@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1120-1128

© 2021UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara potensi tinggi rawan bencana di Dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana, baik itu sebuah bencana alam, bencana non alam atau bahkan bencana sosial. Berdasarkan potensi yang dimilikinya, letak geografis serta kultur masyarakat kita yang memiliki nilai kepadatan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan hal tersebut ikut memengaruhi tingkat potensi bencana yang akan dihadapi beserta sejumlah kerugian ataupun dampak yang akan dirasakan akibat faktor kejadian bencana. Oleh sebab tersebut penanganan terhadap suatu potensi bencana merupakan hal yang harus dipersiapkan dengan serius dan matang sehingga mampu menekan dampak dan kerugian dari potensi bencana yang dimiliki.

Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama, kontribusi dari seluruh aspek pendukung menjadi kunci utama dalam penanggulangan bencana. Tak hanya lapisan masyarakat saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat dapat berperan dalam bentuk kerelawanan membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun ada beberapa kendala dalam yang dihadapi oleh para relawan, terkadang kurang memadainya peralatan dan perlengkapan pendukung pada evakuasi, sehingga menghambat masyarakat dalam ikutserta menjada relawan evakuasi apabila terjadi bencana alam. (Sujanto, 2017)

Dikutip dalam artikel (Taufiq et al., 2017) menyatakan bahwa dalam menjalankan penanggulangan bencana, diperlukan program-program atau penyusunan forum penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Hal ini dimaksud untuk menjadi tumpuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana di daerah-daerah yang

memiliki potensi terdampak. Sangat disadari bahwa kondisi masing-masing wilayah tentu berbeda, sehingga perlu penyesuaian beberapa aspek agar dapat diterapkan pada daerah masing-masing.

Berdasarkan data dari Buletin APBN (Carolina, 2018) menyebutkan bahwa penanggulangan bencana di Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Hal ini melatarbelakangi koordinasi yang kurang sigap antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat salah satunya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga yang mendapat mandat penanggulangan bencana seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain-lain terhadap penanggulangan bencana.

Dikutip dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Rosyida, 2019) pada tahun 2019, Indonesia memiliki sejumlah potensi bencana yang cukup mengkhawatirkan diantaranya adalah bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun merilis bahwa sepanjang tahun 2019 tercatat hampir 3.814 total bencana yang di dominasi oleh bencana alam seperti puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sementara itu pada tahun 2020 dilaporkan terjadi sebanyak 2.929 bencana yang terjadi didominasi oleh bencana alam yakni banjir disertai angin puting beliung dan tanah longsor (Arifin, 2020)

Seperti yang diketahui bahwa pada peta rawan bencana Indonesia yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan hampir seluruh desa atau kelurahan di Indonesia memiliki potensi terhadap bencana, baik itu sebuah bencana berskala besar maupun kecil. Pada Provinsi DKI Jakarta sendiri, fenomena bencana alam seperti banjir, gelombang pasang hingga kebakaran pada pemukiman padat penduduk menjadi hal

yang kerap kali terjadi setiap tahunnya, hal ini menyebabkan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta pun memiliki fokus untuk mengatasi beragam potensi bencana yang dimiliki wilayahnya tersebut.

Upaya yang dicanangkan pemerintah adalah menjalankan program Destana atau yang sering disebut sebagai Desa Tangguh Bencana. Salah satu upaya untuk merubah pola pikir tersebut dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa yang dilakukan oleh BNPB adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dimana pelaksanaan dan arahan terknisnya dijabarkan dalam Perka BNPB No. 1 tahun 2012 (Perka BNPB, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lomba Desa Tangguh Bencana terhadap ketangguhan masyarakat desa pada daerah rawan bencana. Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) menjadi salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat itu sendiri adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. (Muhammad & Muhasim, 2020)

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program destana pada wilayah Kelurahan Cililitan secara mendalam sebagai upaya dalam mitigasi bencana.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas yang menekankan pada empat indikator

aspek penilaian berupa Pertama, Ketepatan program, Kedua, tujuan program, Ketiga, sosialisasi program dan Keempat, pemantauan program. (Budiani, 2021)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, seperti metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara maupun melalui studi pustaka untuk kemudian dilaksanakan pengumpulan data secara mendalam melalui metode yang telah dilaksanakan sebelumnya yang selanjutnya akan dianalisis dan disajikan berdasarkan fakta dan data yang ditemukan selama masa penelitian pada wilayah objek penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peranan serta tugas khusus untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi dengan melindungi segenap masyarakat dari ancaman maupun potensi bencana, khususnya adalah kelompok masyarakat yang berada pada zona rawan bencana serta kelompok masyarakat yang telah terkena dampak bencana itu sendiri.

Secara resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai sebuah program PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) berupa program desa tangguh bencana atau destana atau pada wilayah kota madya seperti Provinsi DKI Jakarta dikenali dengan program Kelurahan Tangguh Bencana (Rahtana) sebagai salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi beragam fenomena terkait bencana yang terjadi di Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 maka program

destana ini secara khusus bertujuan untuk membentuk sebuah desa atau pun kelurahan yang akan memiliki kemampuan dalam mengenali beragam potensi ancaman pada wilayah disekitarnya serta mampu mengorganisir sumber daya, baik sumber daya manusia yang dimilikinya untuk mengurangi kerentanan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana itu sendiri. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang diharapkan dapat beradaptasi dalam menghadapi potensi terjadinya bencana alam yang melanda, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampakbencana yang merugikan. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. (Habibullah, 2013).

Program destana ini dilaksanakan dengan pembekalan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghadapi suatu bencana sekaligus upaya yang dilaksanakan oleh BNPB untuk pengelolaan sumber daya dalam upaya mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat sebuah bencana. Sehingga pemerintah sekaligus masyarakat dapat menghindari atau meminimalisir dampak-dampak yang merugikan dari bencana itu sendiri. Penerapan program destana ini pun diharapkan dapat membantu dalam upaya mitigasi terhadap bencana yang marak terjadi pada zona atau wilayah rawan bencana yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang diwakilkan oleh Kelurahan Cililitan sebagai pusat pelaksanaan sekaligus

wilayah percontohan program ini sendiri.

Dikutip dalam Indeksi Risiko Bencana Indonesia yang di rilis oleh BNPB (Wiguna, 2020) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2020, wilayah provinsi DKI Jakarta mejadi salah satu wilayah dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. Fenomena banjir dan kebakaran pada pemukiman padat penduduk menjadi fenomena bencana yang paling terjadi. Berdasarkan Indek Rawan Bencana Indonesia ditahun 2020 yang dirilis oleh BNPB menyatakan bahwa sejumlah potensi bencana yang mengancam ibu kota tak lain berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, serta gelombang pasang atau abrasi. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana yang dikaji oleh BNPB menyatakan bahwa wilayah timur Jakarta atau tepatnya kota Jakarta Timur memiliki beragam potensi bencana serta berada pada kelas resiko bencana sedang hingga tinggi seperti yang bisa dilihat pada tabel indeks resiko bencana pada wilayah Jakarta Timur dibawah ini.

**Tabel 1.**  
**Indeks Resiko Ancaman Bencana di Wilayah Jakarta Timur 2015-2020**

Jenis Bencana	Kelas Resiko
Banjir	Tinggi
Tanah Longsor	Sedang
Gempa Bumi	Sedang
Tsunami	Sedang
Kebakaran	Tinggi
Gelombang ekstrim & Abrasi	Sedang
Cuaca Ekstrim	Tinggi
Kekeringan	Tinggi

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tahun 2020.

Berdasarkan beberapa data diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pun kemudian mulai melaksanakan program

Desa Tangguh Bencana (Destana) atau dikenal juga dengan sebutan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) sebagai upaya dalam mitigasi bencana di wilayah DKI Jakarta khususnya pada wilayah Jakarta Timur serta menunjuk wilayah Kelurahan Cililitan sebagai wilayah percontohan dari pelaksanaan program desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana. Pelaksanaan program desa tangguh telah berjalan secara resmi pada wilayah Kelurahan Cililitan khususnya pada wilayah Rukun Warga 16 semenjak Oktober 2014 namun kembali dikukuhkan pada oktober 2020 lalu sebagai kelurahan atau desa tangguh yang telah berhasil melaksanakan program ini selama kurang lebih 7 tahun.

Terpilihnya Kelurahan Cililitan tidak terlepas dari pertimbangan mengenai tingkat potensi bencana yang dimiliki wilayah tersebut. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh BPBD yang bekerja sama dengan instansi setempat maka, wilayah Kelurahan Cililitan khususnya pada wilayah Rukun Warga 16 menjadi sebuah wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi serta memberikan dampak yang cukup besar baik dari segi material maupun non material. Hal ini dikarenakan secara geografis Kelurahan Cililitan yang berada pada perlintasan Sungai Ciliwung menyebabkan wilayah tersebut ketika musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi akan menjadi wilayah pertama yang terkena luapan sungai hingga memasuki wilayah penduduk dan menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir (DKI, 2020)

Pada tahun 2019-2020 berikut jumlah laporan terkait fenomena banjir yang terjadi pada wilayah RW16 Kelurahan Cililitan seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.**  
**Daftar Wilayah Terdampak Bencana Banjir RW 16 Kelurahan Cililitan**

No	Wilayah Terdampak	Jumlah Korban Terdampak	Total Bangunan Terdampak
1.	RT. 004	114 Jiwa	24 Rumah
2.	RT. 005	126 Jiwa	27 Rumah
3.	RT. 006	54 Jiwa	12 Rumah
4.	RT. 007	141 Jiwa	32 Rumah
5.	RT. 008	249 Jiwa	42 Rumah
6.	RT. 009	84 Jiwa	12 Rumah
7.	RT. 010	84 Jiwa	20 Rumah
<b>Jumlah</b>		852 Jiwa	169 Rumah

Sumber : Penanggulangan Banjir Kampung Tangguh Bencana Kelurahan Cililitan. 2020.

Desa/Kampung tangguh bencana ini dipilih menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat agar memiliki kemampuan serta perbekalan dalam menghadapi potensi bencana seperti banjir yang melanda wilayahnya hampir setiap tahun.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji menggunakan metode yang dikemukakan oleh Budiani yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa variabel penilaian suatu program dapat dinyatakan efektif secara maksimal ataupun belum secara maksimal apabila dengan mempertimbangkan beberapa variabel berikut ini, Pertama, Ketepatan Program, Kedua, Sosialisasi Program, Ketiga, Tujuan Program, dan terakhir Keempat, Pemantauan Program.

#### 1. Ketepatan Program

Pelaksanaan program Destana memiliki tolok ukur ukuran ketepatan program dengan mengarahkan pada wilayah yang memiliki potensi sedang hingga tinggi terhadap bencana baik itu bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Dalam menentukan peta wilayah pelaksanaan

programnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana pada tiap-tiap daerah untuk melihat serta mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki setiap wilayah sehingga nantinya program desa tangguh bencana ini sendiri dapat menyoar atau memiliki sasaran wilayah yang tepat. Adapun kriteria dari ketepatan program ini sendiri dinilai dari besarnya potensi yang dimiliki suatu wilayah terhadap bencana sekaligus melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari fenomena bencana baik itu sebelum maupun sesudah fenomena bencana tersebut terjadi.

Pada pelaksanaannya program desa tangguh bencana yang menyoar wilayah Kelurahan Cililitan sudah terbilang tepat, mengingat bagaimana potensi bencana seperti banjir serta kebakaran pada pemukiman padat penduduk merupakan bencana utama yang kerap kali terjadi pada wilayah tersebut. Dalam setahun, kasus bencana banjir merupakan jenis bencana yang paling umum terjadi dan menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan bencana.

Pemilihan wilayah Kelurahan Cililitan sendiri diakui oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berdasarkan survey serta hasil pemetaan wilayah atau dengan kata lain telah membagi setiap wilayah berdasarkan besar dan jenis potensi wilayah yang dimilikinya serta melihat dampak bencana yang cukup tinggi pada wilayah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa terpilihnya wilayah Kelurahan Cililitan telah sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh BPBD DKI Jakarta terkait pelaksanaan program desa tangguh bencana atau secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa sesuai dengan kriterianya maka program ini berjalan tepat sesuai dengan sasaran utamanya.

## 2. Tujuan Program

Tujuan utama pelaksanaan program desa tangguh bencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 ialah untuk memberikan perbekalan kepada masyarakat khususnya adalah edukasi mengenai penanggulangan bencana sebagai bentuk upaya mitigasi terhadap bencana. Adapun tujuan ini direalisasikan dengan mengadakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menanggulangi potensi bencana yang dimilikinya seperti kegiatan pembelajaran dan sosialisasi pengetahuan tentang pentingnya upaya penyelamatan diri pada saat bencana maupun pasca bencana, lalu dilanjutkan dengan pemberian perbekalan kepada warga masyarakat berupa sarana dan prasarana yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana seperti alat-alat keselamatan serta obat-obatan. Serta adanya pembangunan berupa Ruang Terpadu Peduli Anak (RPETRA) yang didirikan sebagai sarana pelaksanaan kegiatan desa tangguh bencana dengan menjadi salah satu tempat pengungsian yang akan menampung masyarakat ketika sebuah fenomena bencana terjadi.

Dalam pelaksanaan tujuan program desa tangguh bencana di wilayah Kelurahan Cililitan berjalan dengan baik meski tidak dapat diungkiri bahwa masyarakat mengaku masi merasakan kekurangan terkait dengan sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan kampung tangguh atau desa tangguh bencana ini yang masih terbilang belum mencukupi, hal ini dikarenakan masih belum begitu banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini akibat kurangnya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat menyebabkan minat serta keingintahuan masyarakat terhadap program ini belum cukup tinggi, kemudian disisi lain sarana dan prasarana seperti alat kelengkapan siaga bencana yang dinilai masih mengalami

kekurangan dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

### 3. Sosialisasi Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengutarakan bahwa sesuai dengan standar operasional pelaksanaannya maka, program desa tangguh bencana wajib disosialisasikan kepada masyarakat secara berkala melalui berbagai macam media maupun melalui acara-acara yang terkait dengan upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Dalam perjalanannya pelaksanaan sosialisasi ini digunakan untuk menarik minat masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan sukarelawan desa tangguh bencana ini. Umumnya pelaksanaan sosialisasi dapat dilangsungkan kapan saja dan bisa melalui media apa saja.

Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan tepatnya di wilayah Kelurahan Cililitan, mengakui bahwa pelaksanaan sosialisasi program ini umumnya akan dilaksanakan melalui hasil kerja sama antara pihak Kelurahan Cililitan bersama dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan peresmian desa tangguh bencana maupun melalui media penunjang lainnya seperti media sosial akun terkait desa tangguh bencana.

Namun, pelaksanaan sosialisasi yang berjalan hingga saat ini dapat dikatakan belum banyak membantu masyarakat untuk mengetahui program ini secara jelas dan memahami tujuan dari program desa tangguh bencana ini secara pasti. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu ketua rukun warga (RW) di wilayah Kelurahan Cililitan mengemukakan bahwa umumnya ia beserta warganya hanya mendapatkan sosialisasi yang dilaksanakan sesekali pada suatu acara atau pun ketika ada sebuah peristiwa tanpa adanya pemberitahuan secara berkala.

### 4. Pemantauan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menentukan pemantauan program desa tangguh bencana umumnya harus dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun, adapun bentuk pemantauan ini sendiri adalah berupa pengadaan evaluasi serta simulasi desa tangguh bencana yang mewajibkan seluruh aparat instansi terkait beserta masyarakat ikut terlibat di dalamnya. pelaksanaan simulasi desa tangguh bencana ini dilakukan untuk melihat serta mengawasi sejauh mana pengetahuan serta kesiapsiagaan masyarakat dalam proses mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayahnya setelah mengikuti kegiatan desa tangguh bencana.

BPBD Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan aparat setempat di wilayah Kelurahan Cililitan akan melaksanakan simulasi kegiatan desa tangguh bencana bersama masyarakat berupa simulasi terhadap situasi bencana banjir, gempa bumi, kebakaran pada daerah pemukiman serta beragam potensi bencana lainnya yang memang membutuhkan keterampilan serta pengetahuan mendalam sebagai upaya mitigasinya.

Dalam perjalanannya pelaksanaan simulasi dan evaluasi program destana ini hanya berjalan beberapa waktu saja, menurut kepala rukun warga setempat mengungkapkan bahwa umumnya simulasi dan evaluasi belum banyak dilaksanakan dan umumnya hanya terjadi pada suatu moment tertentu saja yang terhitung cukup jarang sehingga dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan program desa tangguh bencana ini sendiri dalam hal pemantauan program belum berjalan secara maksimal sehingga masih memerlukan perhatian secara khusus agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan program desa tangguh bencana (Destana) di wilayah Kelurahan Cililitan tergolong cukup baik dan efektif. Berdasarkan ketepatannya maka pelaksanaan program desa tangguh bencana pada wilayah Kelurahan Cililitan telah tepat sasaran mengingat kelurahan cililitan khususnya pada wilayah RW 16 merupakan wilayah dengan potensi bencana seperti banjir dan kebakaran pada pemukiman padat penduduk yang cukup tinggi sehingga dengan adanya program desa tangguh bencana pada wilayah kelurahan cililitan ini dinilai tepat untuk membantu mengedukasi serta memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak oleh bencana.

Selain itu, hal terpenting dalam pelaksanaan program adalah menentukan tujuan program, tujuan program desa tangguh bencana untuk membentuk suatu kampung dengan komunitas yang tangguh serta peka terhadap bencana telah berhasil dijalankan dengan membuktikan adanya beberapa relawan desa tangguh bencana yang meski terbilang masih belum mencukupi namun telah berjalan, selanjutnya adanya sarana dan prasarana seperti alat-alat darurat bencana dan adanya ruang terpadu peduli anak telah membuktikan bahwa pelaksanaan program desa tangguh ini telah sesuai dengan tujuannya untuk memberikan masyarakat sebuah perbekalan dalam menghadapi fenomena bencana disekitarnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi program pelaksanaan program desa tangguh bencana membutuhkan sosialisasi yang matang agar dapat menarik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan program desa tangguh yang berjalan di wilayahny, meski belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal namun proses sosilasisasi program desa tangguh bencana ini diharapkan

kedepannya dapat semakin banyak memberikan pengetahuan serta menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam komunitas desa tangguh bencana. Serta dalam hal pemantauan program desa tangguh bencana dilaksanakan dengan menerapkan simulasi beserta evaluasi yang umumnya harus dilaksanakan minimal sebanyak dua kali dalam setahun, hal ini diperlukan untuk melihat sekaligus menilai sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat yang berada pada wilayah desa tangguh bencana dalam menghadapi beragam potensi bencana pada wilayahnya, meskipun begitua masyarakat mengeluhkan bahwa simulasi dan evlauasi hanya dapat terjadi dalam suatu acara saja dan tidak menjadi rutinitas seperti apa yang menjadi prosedur pelaksanaannya yakni pelaksanaan simulasi serta evaluasi yang umumnya harus dilaksanakan minimal sebanyak 2 kali dalam setahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin. (2020, Desember 29). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Retrieved from [bnpb.go.id: https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometologi-mendominasi](https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometologi-mendominasi)

Asmara. (2020, Desember 15). Data Bank Dunia: RI Negara dengan Ancaman Bencana Tertinggi. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020/d-ata-bank-dunia-ri-negara-dengan-ancaman-bencana-tertinggi>

Budiman. (2021). Efektivitas Program Me'Daseng di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal agrisocioekonomi*, 150.

Carolina, M. (2018). Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. *Buletin APBN Oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*.

DKI, P. (2020, Desember 19). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Retrieved from Pemkot DKI Jakarta wilayah Jakarta Timur: <http://timur.jakarta.go.id>

Habibullah, H. (2013). KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KOMUNITAS: KAMPUNG SIAGA BENCANA DAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA. *Sosio Informa*. <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.69>

Muhammad, Z., & Muhasim, M. (2020). PENGARUH LOMBA DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA (DESTANA) TERHADAP KETANGGUHAN MASYARAKAT DI WILAYAH RAWAN BENCANA. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i1.768>

Rosyida, A. (2019). *Data Bencana Indonesia 2018*. Jakarta: Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana .

Sujanto, B. A. (2017). Efektivitas Peran Relawan Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat Banjir Jakarta Timur dalam Rangka Penyelamatan Korban Manusia (Studi di Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2014). *The Effectiveness of Disaster Management Volunteer Role in East Jakarta Flood Emergency Response in Terms of Human Victims Rescue (Study At Kampung Melayu in 2014)*.

Taufiq, A., Setiyawan, L. A., Hardiseno, U., Ziz, M. N., Khoirudin, M., Apriyadi, F., Amalia, N., Insani, S. P., Ferdous, N. N., Wardhani, K. T., & Maulana, V. Z. (2017). Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat ( Community - Based Disaster Risk Reduction ). *Prosiding Seminar Nasional Seri 7 "Menuju Masyarakat Madani Dan Lestari."*

Wiguna, S. (2020). *Indeksi Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.